



STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PENGENTASAN KEMISKINAN INKLUSIF

Muhamad Samunawardi¹; Riansyah²; Firmansyah Samring³

^{1,2}*Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia.*

³*Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta.*

¹*Correspondence Email: samunawardimuhamad@gmail.com*

Received: 12 Maret 2024

Accepted: 20 Juni 2024

Published: 25 Juni 2025

Abstract

This study aims to analyze the strategy of the West Nusa Tenggara Regional Government in realizing inclusive poverty alleviation through a qualitative approach based on the Systematic Literature Review (SLR). This study reviews scientific literature from the Dimensions and Scopus databases in the period 2015–2024, with strict selection criteria to ensure data relevance and quality. The findings show that although various studies have discussed social assistance innovation, collaborative governance, and the role of local governments, there are still gaps in the overall integration strategy. This study finds that the success of an inclusive poverty alleviation strategy is highly dependent on the synergy between policy, technology, and community participation. Data visualization through VOSviewer reveals a close relationship between institutional aspects, digitalization services, and empowerment communities in driving equitable economic transformation. The results of this study recommend strengthening regional policies based on collaborative ecosystems and placing women's and children's issues in structural development priorities. Thus, this study contributes to the formulation of a more adaptive, participatory, and sustainable poverty alleviation strategy in a region with social complexity such as NTB.

Keywords: *local government, Poverty Alleviation, inclusif*

A. Pendahuluan

Kemiskinan tidak hanya merefleksikan keterbatasan ekonomi, tetapi juga merupakan hasil dari ketimpangan struktural dalam akses terhadap layanan dasar, peluang pekerjaan, dan partisipasi dalam pembangunan. Dalam kerangka pembangunan inklusif, kemiskinan harus dipandang sebagai fenomena multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik. Misalnya, kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat sering mengalami diskriminasi berlapis yang memperkuat eksklusi sosial mereka (Pratama, 2023a). Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan yang efektif tidak cukup hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga harus menjamin akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan ruang partisipasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan (Ipinnaiye & Olanigan, 2023).

Kemiskinan disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling berhubungan. Pertama, keadaan lingkungan dan ekonomi seperti bencana alam, keterbatasan sumber daya alam, atau perubahan ekonomi dapat berdampak pada pendapatan serta kesejahteraan orang atau kelompok, menjadikan mereka lebih mudah terjerat dalam kemiskinan. Kedua, faktor-faktor struktural dan sosial, seperti minimnya akses terhadap pendidikan yang baik, kesempatan kerja yang sedikit, atau ketidakmerataan dalam sistem ekonomi, dapat menimbulkan rintangan bagi individu untuk keluar dari kondisi kemiskinan (Pratama, 2023b).

Konsep pembangunan inklusif menuntut agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok dominan, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Dalam praktiknya, pembangunan inklusif mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Negara-negara yang berhasil mendorong kebijakan inklusif, seperti Jerman dalam transisi energinya atau Polandia dalam pendidikan inklusif, menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kebijakan substantif, tetapi juga pada proses kebijakan yang menjamin keterlibatan semua actor (Liu, 2022); Oleh karena itu, dalam konteks daerah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), pembangunan inklusif harus memperhatikan ketimpangan spasial dan sosial, dengan mengedepankan pendekatan yang adaptif terhadap lokalitas (Choudhury, 2020).

Pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam menginisiasi kebijakan inklusif karena kedekatannya dengan komunitas serta pemahaman terhadap kebutuhan kontekstual. berbagai kebijakan daerah telah menunjukkan arah ke sana, seperti pengarusutamaan gender dalam perencanaan daerah, penyusunan Rencana Aksi Daerah Inklusi Disabilitas, hingga penguatan musyawarah desa sebagai forum deliberative(Tackie et al., 2022). Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini kerap terganjal oleh dominasi struktur patriarkal, rendahnya kapasitas lembaga lokal, dan lemahnya akuntabilitas birokrasi(Maolani, 2024). Di sisi lain, pengalaman dari New South Wales menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Disability Inclusion Action Plan sangat ditentukan oleh komitmen lintas sektor dan adanya mekanisme pemantauan yang jelas(Nyasimi et al., 2025). Oleh karena itu, tantangan di NTB menuntut perbaikan tidak hanya pada substansi kebijakan, tetapi juga pada tata kelola implementasinya.

Usaha untuk merespons dan memulihkan bencana yang bersifat non-alam tidak hanya berasal dari pihak Pemerintah, tetapi juga melibatkan respons dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau NonGovernmental Organizations (LSM), perusahaan-perusahaan, lembaga serta institusi swasta, angkatan bersenjata, organisasi masyarakat, masyarakat umum, dan media sebagai sarana untuk membingkai isu-isu yang muncul(Hassanat, 2023).Inovasi dalam bantuan sosial menjadi salah satu instrumen strategis untuk mendorong inklusi sosial di NTB. Implementasi Radio Frequency Identification (RFID) pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bonemarambe, misalnya, menunjukkan potensi teknologi dalam meminimalkan kesalahan distribusi dan meningkatkan ketepatan sasaran(Wang & Liu, 2023). Namun, digitalisasi ini juga menghadirkan tantangan baru, seperti risiko eksklusi digital terhadap kelompok miskin di daerah terpencil(Putra et al., 2025). Transformasi Program Sembako dari skema bantuan pangan konvensional menjadi mekanisme nontunai yang melibatkan e-Warong, selain meningkatkan gizi penerima manfaat, juga memperlihatkan potensi pemberdayaan ekonomi lokal melalui kerja sama dengan pedagang kecil. Walau demikian, data menunjukkan bahwa peningkatan daya beli akibat bantuan nontunai juga mendorong konsumsi yang tidak sehat, seperti rokok, yang menimbulkan dilema kebijakan(Mahmuda et al., 2025). Oleh karena itu, desain bantuan sosial ke

depan harus mempertimbangkan mekanisme kontrol dan literasi konsumen untuk mengoptimalkan dampaknya.

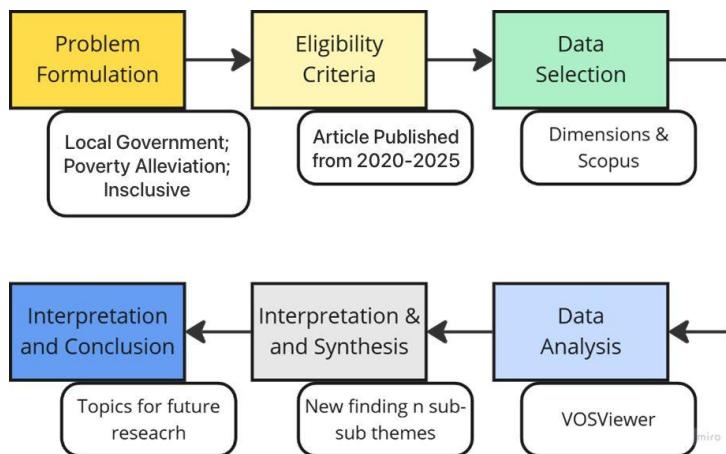
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam mengatasi kemiskinan yang kompleks dan saling terkait antar bidang. Di NTB, praktik kolaborasi antara pemerintah, LSM lokal, dan komunitas telah berkembang dalam berbagai program, seperti penanganan gizi buruk, pendidikan anak usia dini, dan perlindungan sosial berbasis komunitas. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan kolaboratif tidak hanya tergantung pada jumlah aktor yang terlibat, tetapi juga pada kesetaraan relasi kuasa, kejelasan peran, dan fleksibilitas kelembagaan. Di Singapura, keberhasilan penanganan krisis kesehatan melalui koordinasi lintas sektor menunjukkan pentingnya arsitektur kelembagaan yang responsif (Sarimuddin, 2023). Sebaliknya, studi di Kolombia dan Jerman menekankan bahwa tanpa manajemen asimetri kekuasaan, kolaborasi dapat memperkuat dominasi aktor kuat dan mengabaikan suara lokal (Muslim et al., 2021). Oleh karena itu, penguatan tata kelola kolaboratif di NTB harus disertai dengan mekanisme akuntabilitas horizontal yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan menilai proses kebijakan secara partisipatif.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas inovasi program bantuan, peran pemerintah lokal, serta tata kelola kolaboratif dalam pengentasan kemiskinan, masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana strategi-strategi ini secara terpadu dijalankan oleh pemerintah daerah di wilayah dengan kompleksitas sosial seperti NTB. Kebanyakan studi bersifat sektoral dan belum mengintegrasikan pendekatan inklusif dalam satu kerangka strategis yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan inklusif melalui integrasi kebijakan, inovasi bantuan sosial, dan penguatan tata kelola kolaboratif. Dengan fokus pada keterkaitan antara institusi lokal, teknologi, dan partisipasi masyarakat, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap formulasi kebijakan daerah yang lebih adil dan berkelanjutan.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua hasil penelitian yang relevan mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pengentasan Kemiskinan Inklusif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Data dalam penelitian ini bersumber dari database Dimensions (<https://app.dimensions.ai>) dan Scopus (<https://www.scopus.com>) dengan interval publikasi 5 tahun terakhir untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data terkini dan relevan dengan Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pengentasan Kemiskinan Inklusif. Sumber informasi yang digunakan termasuk jurnal, platform digital, dan media cetak yang membahas tentang perkembangan kemiskinan di Kota Mataram dalam sepuluh tahun terakhir (Pratama et al., 2024). Selain itu, peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi untuk mendapatkan data yang lebih tepat dan mendalam (Pfisterer & Van Tulder, 2021). Di samping itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui analisis dokumen yang relevan.

Kriteria kelayakan data dalam penelitian ini ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya literatur yang relevan dan berkualitas tinggi yang dianalisis. Kriteria tersebut meliputi (1) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi; (2) studi yang secara khusus membahas Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pengentasan Kemiskinan Inklusif; (3) publikasi yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir (2020-2025); (4) artikel yang tersedia dalam bentuk teks lengkap dan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Prosedur penelitian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Prosedur penelitian

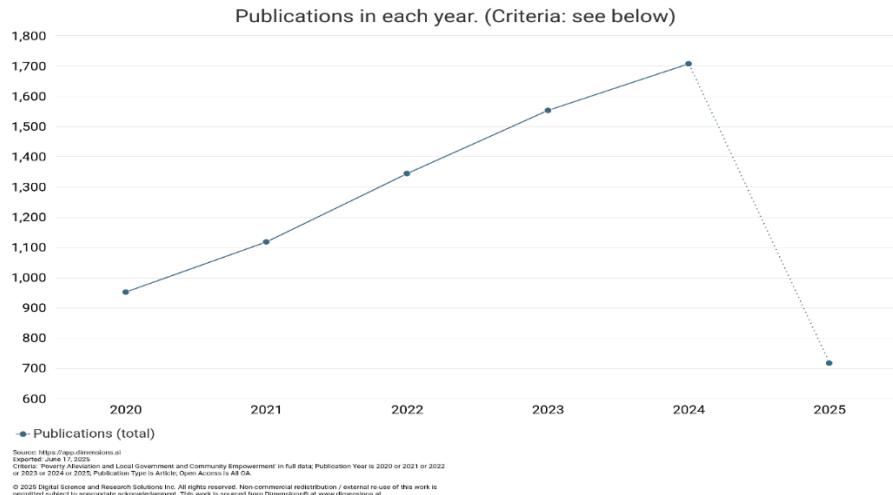
Gambar 1 menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu perumusan masalah, penentuan kriteria kelayakan, seleksi data, analisis data, interpretasi dan sintesis data, dan penarikan kesimpulan. Tahap perumusan masalah penting dilakukan untuk membatasi topik yang dibahas, yaitu Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pengentasan Kemiskinan Inklusif.

Kriteria kelayakan ditentukan untuk menyaring data yang sesuai dengan topik dengan kata kunci yang relevan seperti "(pemerintahan daerah AND pengentasan kemiskinan AND inklusif) OR (Local Government and Poverty Alleviation and Inclusive)". Selanjutnya, data dipilih dari database Dimensi dan filter diterapkan untuk data yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir (2015-2024). Selanjutnya, data yang terkumpul diimpor ke dalam perangkat lunak VOSviewer untuk membuat visualisasi hubungan antara kata kunci dan tema dalam penelitian ini. Hasil visualisasi dan analisis data dari VOSviewer diinterpretasikan untuk menjelaskan variabel-variabel kunci dalam Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pengentasan Kemiskinan Inklusif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Hasil pencarian di database pengindeks menemukan total 96,590 data, meliputi data *open access* sebanyak 20,809 data dan sisanya adalah *close access*. Dari 20,809 data tersebut, terdapat 13,574 data merupakan artikel dan 7.235 data merupakan buku dan prosiding. Dengan demikian, terdapat 7,391 data yang akan dianalisis pada tahap selanjutnya. Sebaran jumlah data tersebut sesuai dengan Gambar 2.



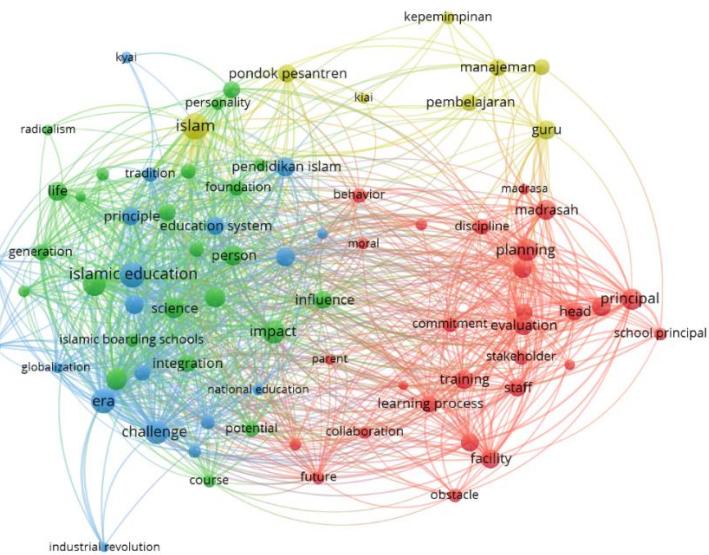
Gambar 2. Distribusi jumlah data selama 5 tahun terakhir

Gambar 2 menunjukkan bahwa Dari grafik tersebut terlihat bahwa jumlah publikasi mengalami tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah publikasi tercatat sekitar 950 artikel. Jumlah ini terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya: sekitar 1.100 publikasi pada tahun 2021, 1.350 pada tahun 2022, dan 1.550 pada tahun 2023. Puncaknya terjadi pada tahun 2024 dengan total publikasi mencapai sekitar 1.700 artikel. Peningkatan ini menunjukkan bahwa topik pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan peran pemerintah daerah menjadi perhatian serius di kalangan akademisi dan peneliti global dalam lima tahun terakhir.

Namun, grafik juga menampilkan penurunan drastis jumlah publikasi pada tahun 2025, yang hanya tercatat sekitar 700 artikel. Penurunan ini ditandai dengan garis putus-putus, yang menunjukkan bahwa data tahun 2025 masih bersifat sementara atau belum final. Karena grafik ini dibuat pada pertengahan tahun (Juni 2025), sangat mungkin bahwa banyak publikasi untuk tahun ini belum selesai diproses atau belum dimasukkan ke dalam basis data.

1. Network Visualization of Data

Data yang telah melalui proses seleksi kemudian divisualisasikan dengan menggunakan VOSviewer untuk melihat variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel. Hasil visualisasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Network visualization dari variabel penelitian

Figure 3 is a network visualization of all the variables studied over the past 10 years and depicts four different color groups: green, red, yellow, and blue. The interpretation of each variable is as follows.

a. Green Cluster (Intervensi Sosial dan Ketimpangan Gender-Usia)

Klaster ini mencakup tema seperti *intervention, woman, child, mental health, cash transfer, dan inequality*. Ini merupakan dimensi intervensi sosial langsung pada kelompok rentan (perempuan, anak-anak), termasuk intervensi berbasis tunai, layanan kesehatan, dan nutrisi. Keterkaitan erat antar kata menunjukkan hubungan kompleks antar aspek ketimpangan dan hasil kesehatan.

b. Blue Cluster (Dimensi Kerentanan Rumah Tangga dan Ketahanan Sosial)

Klaster biru didominasi oleh kata kunci seperti *household, farmer, food insecurity, rural household, disease, age, credit, dan loss*. Ini menunjukkan fokus pada dinamika rumah tangga, khususnya di wilayah pedesaan, yang rentan terhadap ketidakamanan pangan, penyakit, serta keterbatasan akses pembiayaan.

c. Red Cluster (Dimensi Tata Kelola, Inovasi, dan Ekonomi Berkelanjutan)

Klaster merah mencerminkan tema besar seputar *governance, sustainability, technology, innovation, dan management*. Kata kunci seperti “climate change”, “tourism”, “finance”, “local community”, hingga “conservation” menunjukkan bahwa isu keberlanjutan, ekonomi lokal, dan peran teknologi dalam pembangunan menjadi perhatian utama. Kata “China” dan “Indonesia” mengindikasikan studi kasus negara berkembang sebagai objek penelitian.

d. Yellow Cluster (Integrasi Ilmu, Kolaborasi, dan Teori Inklusif)

Kata kunci seperti *collaboration, inclusion, goal, progress, theory, degree, dan trend* menyiratkan landasan teoritis, metodologi lintas disiplin, dan upaya mengintegrasikan pendekatan inklusif dalam kebijakan dan program. Klaster ini bertindak sebagai jembatan antar klaster, mengaitkan pendekatan konseptual dan praktik kebijakan.

Based on the cluster division, researchers can make a more in-depth study of several topics as follows.

a. Dampak Program Bantuan Sosial Tunai dan Nontunai terhadap Kesejahteraan Perempuan dan Anak di NTB

Program bantuan sosial tunai dan nontunai memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan perempuan dan anak melalui tiga dimensi utama, yaitu *economic agency*, asupan gizi, dan *subjective wellbeing*. (Behnke & Hegele, 2024) menunjukkan bahwa *conditional cash transfers* (CCTs) dapat meningkatkan agensi ekonomi perempuan dengan mengurangi deprivasi multidimensional, terutama dalam aspek ekonomi dan relasional. Namun demikian, efektivitas program bantuan sosial tidak selalu seragam. Di Indonesia, transfer tunai langsung (BLT) justru berdampak negatif terhadap pendidikan anak pada rumah tangga yang dikepalai perempuan, yang mengindikasikan adanya diskriminasi sosial yang membatasi efektivitas program tersebut (Setyari & Purwanti, 2022). Sebaliknya, bantuan nontunai seperti Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah terbukti meningkatkan konsumsi pangan berkualitas pada rumah tangga miskin, terutama dalam asupan lemak dan protein (Istriawati & Dartanto, 2022). Meskipun demikian, hambatan akses terhadap program, seperti yang terjadi dalam program tunjangan anak di Afrika Selatan (Luthuli et al., 2022), menunjukkan bahwa kendala administratif masih menjadi faktor yang membatasi dampak positif bantuan tersebut.

Dari perspektif kesejahteraan subjektif, program seperti *unconditional cash transfer* (UCT) di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Khomaini (2020) menemukan bahwa meskipun terdapat peningkatan kepuasan keluarga, persepsi terhadap masa depan dan kesejahteraan anak tidak mengalami perubahan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa bantuan

finansial semata tidak cukup untuk mengubah dinamika kesejahteraan secara holistik. Dalam konteks yang lebih luas, pendekatan lintas sektor menjadi sangat penting untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi. Studi di Tanzania membuktikan bahwa pembentukan tim aksi gizi multisector mampu menjembatani koordinasi antara sektor pertanian dan kesehatan dalam perencanaan serta penganggaran program gizi (Khomaini, 2020). Demikian pula, program koalisi komunitas seperti *United for Health* berhasil mengintervensi lingkungan pangan melalui kolaborasi multipihak (Payán et al., 2022), sementara studi di Ethiopia dan Bangladesh menekankan pentingnya upaya yang ditargetkan dalam memperbaiki akses dan mutu layanan gizi di daerah miskin dan pedesaan (Luthuli et al., 2022).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa keberhasilan program bantuan sosial terhadap kesejahteraan perempuan dan anak sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan kelembagaan lokal. Di Nusa Tenggara Barat, potensi positif bantuan tunai dan nontunai dapat dimaksimalkan apabila disertai dengan intervensi lintas sektor yang adaptif terhadap kebutuhan lokal dan sensitif terhadap dinamika gender. Hambatan struktural seperti diskriminasi sosial terhadap perempuan kepala keluarga, keterbatasan akses layanan dasar di daerah terpencil, serta belum optimalnya koordinasi antarsektor perlu diatasi melalui pendekatan integratif berbasis komunitas dan tata kelola kolaboratif. Maka dari itu, untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak secara inklusif di NTB, strategi bantuan sosial harus dirancang tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi sosial dan penguatan kapasitas lokal (Soni et al., 2023).

b. Intervensi Lintas Sektor dalam Menurunkan Ketimpangan Akses Kesehatan dan Gizi

Kemajuan teknologi memiliki dampak yang ambivalen terhadap ketimpangan ekonomi. Di satu sisi, inovasi teknologi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi; namun, tanpa intervensi kebijakan yang memadai, inovasi tersebut berpotensi memperbesar kesenjangan pendapatan. Hal ini terlihat dari studi (Setyari & Purwanti, 2022) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan teknologi tanpa disertai pengeluaran publik yang progresif justru memperlebar jurang ketimpangan. Sebaliknya, dalam konteks Indonesia, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah terbukti mampu menurunkan ketimpangan pendapatan ketika diiringi dengan kebijakan redistribusi yang terarah (Setyadi et al., 2023). Oleh karena itu, teknologi harus diintegrasikan dengan strategi pembangunan yang inklusif untuk menghasilkan dampak pemerataan ekonomi yang signifikan. Dalam ekosistem ini, kewirausahaan sosial memainkan peran strategis sebagai jembatan antara teknologi dan kebutuhan komunitas. Pendekatan

kewirausahaan sosial yang berbasis teknologi mendorong terciptanya inovasi yang berorientasi pada pemecahan masalah sosial, sehingga mampu meningkatkan kondisi ekonomi lokal secara partisipatif (Skotnicka & Mrózek, 2023). Studi kasus di Italia menunjukkan bahwa alih teknologi ke dalam badan usaha sosial dapat memperkuat pembangunan ekonomi sekaligus mereduksi ketimpangan, dengan cara mengaitkan solusi teknologi secara langsung pada tujuan sosial. Di tingkat mikro, adopsi teknologi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti menjadi motor transformasi digital yang memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha. Di Malang, kesiapan teknologi dan penggunaan media sosial menyumbang 67,2% terhadap kinerja UMKM, menegaskan peran strategis digitalisasi dalam membangun ketahanan ekonomi daerah (Butler, 2023).

Berdasarkan temuan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa transformasi ekonomi inklusif memerlukan sinergi antara inovasi teknologi, pemberdayaan komunitas, dan keberadaan wirausaha sosial yang adaptif terhadap konteks lokal. Dalam kerangka ini, teknologi tidak cukup hanya dihadirkan sebagai alat produksi, tetapi harus diposisikan sebagai katalisator inklusi sosial. Di daerah seperti Nusa Tenggara Barat, yang memiliki tantangan struktural dalam hal ketimpangan regional dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, penguatan kapasitas UMKM berbasis digital, transfer teknologi ke organisasi masyarakat, dan pengembangan ekosistem kewirausahaan sosial berbasis komunitas dapat menjadi strategi kunci untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

c. Tata Kelola Kolaboratif antara Pemerintah, LSM, dan Komunitas dalam Penanganan Kemiskinan

Model tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya pelibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan kemiskinan secara inklusif. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang tidak hanya menyediakan kebijakan dan sumber daya, tetapi juga memastikan bahwa program yang dilaksanakan relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat (Khasanah et al., 2021). Di sisi lain, LSM memainkan fungsi intermediasi dengan menjembatani komunikasi antara negara dan masyarakat, serta merancang intervensi yang spesifik terhadap persoalan struktural kemiskinan di tingkat akar rumput (Soni et al., 2023). Peran komunitas sangat krusial karena melalui partisipasi aktif mereka dalam perencanaan dan implementasi program, kebijakan menjadi lebih adaptif terhadap nilai budaya, struktur sosial, dan aspirasi lokal (Sujatmiko et al., 2023).

Keunggulan dari pendekatan kolaboratif ini terletak pada kemampuannya menciptakan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih menyeluruh dan kontekstual. Sinergi antar sektor memungkinkan terjadinya konsolidasi sumber daya, keahlian, dan jaringan kelembagaan untuk merespons kompleksitas persoalan kemiskin (Payán et al., 2022). Selain itu, model ini berkontribusi terhadap penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat karena menekankan pada aspek pemberdayaan daripada sekadar pemberian bantuan (Khasanah et al., 2021). Kepercayaan antar pemangku kepentingan pun terbangun melalui proses interaksi yang transparan dan dialogis, yang secara langsung meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program (Sujatmiko et al., 2023). Kendati demikian, keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengelola konflik kepentingan dan menjaga keselarasan visi antar aktor.

Dalam konteks “Tata Kelola Inklusif dan Kolaborasi Antarpemangku Kepentingan”, temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya pergeseran paradigma dari pendekatan hierarkis ke model partisipatif yang mengintegrasikan perspektif masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan (Istriawati & Dartanto, 2022). Di wilayah seperti Nusa Tenggara Barat, yang memiliki keragaman sosial dan geografis, tata kelola kolaboratif dapat menjadi instrumen strategis dalam menciptakan solusi kemiskinan yang adaptif, berakar dari lokalitas, dan mengutamakan keadilan sosial. Pemerintah daerah perlu mendorong mekanisme koordinasi lintas sektor yang inklusif, memperkuat kapasitas kelembagaan lokal, dan membangun ruang deliberatif sebagai platform bersama untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan (Khasanah et al., 2021).

D. Kesimpulan

Keberhasilan strategi pengentasan kemiskinan yang inklusif di Nusa Tenggara Barat sangat ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan bantuan sosial tunai dan nontunai dengan pendekatan lintas sektor, pemberdayaan komunitas, serta tata kelola kolaboratif yang responsif terhadap dinamika sosial dan kultural lokal. Transformasi ekonomi yang berkeadilan tidak hanya menuntut akses terhadap sumber daya, tetapi juga membutuhkan sinergi teknologi, kewirausahaan sosial, dan inovasi kebijakan berbasis partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, desain kebijakan ke depan harus menempatkan kesejahteraan perempuan dan anak sebagai prioritas

struktural dalam kerangka pembangunan inklusif yang holistik.

Kajian mendalam mengenai efektivitas integrasi bantuan sosial dengan intervensi pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas di NTB menjadi penting untuk mengidentifikasi model kebijakan yang paling adaptif dan berkelanjutan. Selain itu, riset mengenai penguatan ekosistem kolaboratif antar-pemangku kepentingan lokal dalam mendukung transformasi ekonomi digital berbasis UMKM perlu segera dilakukan guna mempercepat pembangunan yang berkeadilan dan partisipatif.

Daftar Pustaka

Behnke, N., & Hegele, Y. (2024). Achieving cross-sectoral policy integration in multilevel structures—Loosely coupled coordination of “energy transition” in the German “Bundesrat.” *Review of Policy Research*, 41(1), 160–183. <https://doi.org/10.1111/ropr.12551>

Butler, K. (2023). Key achievements of New South Wales local government Disability Inclusion Action Plans in the era of inclusion policy and planning: A policy content analysis. *Australian Journal of Social Issues*, 58(2), 398–411. <https://doi.org/10.1002/ajs4.259>

Choudhury, B. (2020). *Addressing Urban Poverty through Empowerment and Inclusion in India*. 15–29. https://doi.org/10.1007/978-981-15-1439-5_2

Hassanat, A. (2023). Inclusive Poverty Reduction for Sustainable Development in Nigeria. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION RESEARCH STUDIES*. <https://doi.org/10.55677/ijssers/v03i5y2023-18>

Ipinaiye, O., & Olanigan, F. (2023). An exploratory study of local social innovation initiatives for sustainable poverty reduction in Nigeria. *Sustainable Development*. <https://doi.org/10.1002/sd.2502>

Istriawati, N., & Dartanto, T. (2022). Dampak Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Konsumsi Makanan dan Rokok pada Rumah Tangga Miskin di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1158–1172. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1407>

Khasanah, R. P., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2021). Tata Kelola Kolaboratif Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan*

Sosial Politik Universitas Medan Area, 9(1), 29–35.
<https://doi.org/10.31289/jppuma.v9i1.3755>

Khomaini, A. A. (2020). Dampak Program Bantuan Tunai (Cash Transfer) terhadap Kesejahteraan Subyektif di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.161>

Liu, L. (2022). Poverty Reduction in A Transforming China: A Critical Review. *Journal of Chinese Political Science*, 27, 771–791. <https://doi.org/10.1007/s11366-022-09822-2>

Luthuli, S., Haskins, L., Mapumulo, S., & Horwood, C. (2022). Does the unconditional cash transfer program in South Africa provide support for women after child birth? Barriers to accessing the child support grant among women in informal work in Durban, South Africa. *BMC Public Health*, 22(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12503-7>

Mahmuda, R. B., Handayani, I., Fauzani, M. A., & Huda, N. (2025). ALTERNATIVE OF LOCAL GOVERNMENT LEGAL POLICIES IN IMPLEMENTING POVERTY REDUCTION. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.790>

Maolani, D. Y. (2024). Policy Innovations in Poverty Reduction: Assessing Government Strategies and Their Impact on Socioeconomic Development. *International Journal of Religion*. <https://doi.org/10.61707/gn5qy464>

Muslim, M. A., Prasojo, E., & Jannah, L. M. (2021). Collaborative Governance for Poverty Alleviation: A Systematic Mapping Study. *RUDN Journal of Public Administration*, 8(1), 20–36. <https://doi.org/10.22363/2312-8313-2021-8-1-20-36>

Nyasimi, M. M., Karyeija, J., & Nyamboga, T. O. (2025). Eradicating Household Poverty in Emerging Economies through Government Change Management Strategies. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2025/v25i41736>

Payán, D. D., Lewis, L. V. B., Illum, J., Hawkins, B., & Sloane, D. C. (2022). United for health to improve urban food environments across five underserved communities: a cross-sector coalition approach. *BMC Public Health*, 22(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13245-2>

Pfisterer, S., & Van Tulder, R. (2021). Governing partnerships for development in post-conflict settings: Evidence from a longitudinal case study in Colombia. *Business Ethics, the Environment and Responsibility*, 30(S1), 44–60. <https://doi.org/10.1111/beer.12278>

Pratama, I. N. (2023a). Dinamika Kemiskinan di Kota Mataram: Analisis Perubahan Tingkat Kemiskinan Dalam Dekade Terakhir. *Seminar Nasional LPPM UMMAT*, 2(April), 1216–1222.

Pratama, I. N. (2023b). Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 61–77. <https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.221>

Pratama, I. N., Hadi, A., & Umami, R. (2024). Pengaruh Partisipasi Politik Inklusif Dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Keterlibatan Generasi Z Pada Pemilu 2024 Di Desa Bagik Polak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(11), 2986–2993. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i11.627>

Putra, D., Barus, B., Ernan, R., Fauzi, A., & Gai, A. (2025). Poverty Reduction Through Adaptive Social Protection and Spatial Poverty Model in Labuan Bajo, Indonesia's National Strategic Tourism Areas. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su17020555>

Sarimuddin, S. (2023). Sistem Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Berbasis Radio Frequency Identification (RFID). *JTKSI (Jurnal Teknologi Komputer Dan Sistem Informasi)*, 6(1), 15–22.

Setyadi, S., Indriyani, L., & Syaifudin, R. (2023). Strategies of Regional Levies of the Agriculture and Plantation Office of Central Java Province. *EKO-REGIONAL: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 18(1). <https://doi.org/10.32424/1.erjpe.2023.18.1.3371>

Setyari, N. P. W., & Purwanti, P. A. P. (2022). Direct Cash Transfer Effect on Children Quality in Women's Household in Indonesia. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 11(1), 83–94. <https://doi.org/10.15408/sjje.v11i1.22769>

Skotnicka, B., & Mrózek, S. (2023). The Activities of Local Government Municipal Units in Shaping Inclusive Education in Poland. *Przegląd Badań Edukacyjnych*, 2(40), 329–348. <https://doi.org/10.12775/pbe.2022.030>

Soni, G. K., Seth, S., Arora, S., Singh, K., Kumari, A., Kanagat, N., & Fields, R. (2023). Harnessing the Power of Collaboration to Expand the Coverage

and Equity of COVID-19 Vaccinations in India: A Community Collaboration Model. *Vaccines*, 11(6). <https://doi.org/10.3390/vaccines11061022>

Sujatmiko, S., Orbawati, E. B., -, F., & Mukti, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bligo Sebagai Strategi Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2528>

Tackie, E. A., Chen, H., Ansah, K. A., Atingabili, S., & Ahakwa, I. (2022). Investigating the Relationship Between Local Business and Employment Creation for Poverty Reduction in Northern Ghana: The Moderating Role of Local Economic Development (LED) Policy. *SAGE Open*, 12. <https://doi.org/10.1177/21582440221108173>

Wang, Y., & Liu, L. (2023). The Multilevel Politics of Government–Business Collaboration in China’s Rural Poverty Alleviation. *The China Quarterly*, 259, 661–676. <https://doi.org/10.1017/S0305741023001479>